

PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN DI DISTRIK BIAK BARAT (Suatu Studi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua)

Oleh

**NATALIS WANMA
070 813 260**

ABSTRAK

Salah satu hal penting yang turut menentukan peranan Kepala Distrik dalam membantu kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah adalah usaha untuk membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena betapa pun besarnya peranan pemerintah yang dilakukan tanpa disertai dengan partisipasi masyarakat, maka segala program yang direncanakan oleh Kepala Distrik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan sangat diperlukan. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka Kepala Distrik memiliki peranan penting dalam melaksanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala Distrik dalam partisipasi masyarakat dibidang pembangunan di wilayah Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor berjalan sesuai dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus pemerintah provinsi Papua sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan sekarang.

Peranan Kepala Distrik Biak Barat dalam partisipasi masyarakat di Bidang Pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan kampung yang memperoleh dana bantuan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Kata Kunci : Kepala Distrik, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan

• **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Pemikiran

Keberadaan organisasi pemerintahan kecamatan secara nasional dan khusus di Papua dengan penyebutan langsung kepada masyarakat adalah Distrik. Sebagai sub system pemerintahan di Indonesia, maka Distrik mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan, umur, maupun kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah maupun banyaknya kampung (sebagai sebutan lain dari desa) dan Kelurahan dilingkungan kerjanya.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Beberapa studi yang menonjol oleh D .D Fagg tahun 1958 yang mengkaji camat dan kantornya.

Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schlte Nordholt (1987) yang mengkaji organisasi pemeritah kecamatan dengan menitik beratkan pada hubungan camat dengan Lurah dan berbagai kajian lainnya yang berhubungan dengan peran kecamatan dan Camat..

Unifa Rosidi (2007) menyebutkan bahwa Kepala Distrik melaksanakan fungsi beragam jenis pelayanan kepada masyarakat ataupun melakukan pelayanan khusus pada suatu bidang.

Dengan demikian apa yang dikemukakan diatas, maka camat memiliki peran yang cukup luas dan kompleks. Salah satu tugas Kepala Distrik yang cukup penting sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan disebutkan bahwa salah satu tugas Kepala Distrik adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup wilayah kerjanya.

Tugas pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Distrik menjadi sangat penting, karena Kepala Distrik disamping sebagai pelaksana tugas dibidang pemerintahan juga berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Salah satu hal penting yang turut menentukan peranan Kepala Distrik dalam membantu kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah adalah usaha untuk membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena betapa pun besarnya peranan pemerintah yang dilakukan tanpa disertai dengan partisipasi masyarakat, maka segala program yang direncanakan oleh Kepala Distrik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan.

Menurut Bryant dan White (1982), prakarsa dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas (*top down dan bottom up*) itu penting berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: bahwa melalui prakarsa dari atas ke bawah masyarakat dapat memberi tanggapan laporan- laporan dan keluhan feed back kepada pihak atas mengenai hal-hal yang menyangkut jawaban, tanggapan laporan dan keluhan. Jika seorang warga masyarakat tidak bebas menyatakan pendapatnya mengenai suatu hal yang menyangkut usaha perbaikan atau kegiatan sosial, yang bersangkutan telah kehilangan daya lindung atau pertahanannya selaku anggota masyarakat, oleh karena itu, melalui prakarsa dari bawah ke atas, masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi. Permintaan atau tuntutan kepada pemerintah.

Sebagai wujud pembangunan masyarakat melalui usaha pencapaian tujuan demokrasi yang tinggi. Semangat pembangunan maka masyarakat terus menerus di didik untuk dapat menghargai prinsip-prinsip demokrasi. Hal inilah yang dapat menimbulkan rasa tanggungjawab masyarakat, rasa wajib untuk mengusahakan kepentingan bersama dan semangat kerja sama. Sebagaimana di kemukakan oleh Ndraha dalam Walmaliki (1999) adalah: bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu titik awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana), partisipasi dalam perencanaan

operasional pembangunan, partisipasi dalam menerima, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka Kepala Distrik memiliki peranan penting dalam melaksanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Alasannya karena partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Kepala Distrik sebagai pelaksana tugas yang dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, disatu pihak dan dipihak lain masyarakat dapat berpartisipasi untuk membantu kegiatan perencanaan pembangunan, hal ini sangat berkaitan dengan suatu proses dalam tujuan, menetapkan kebutuhan, menetapkan skala prioritas serta alternatif-alternatif kegiatan yang akan dikerjakan dan bagaimana menetapkan kegiatan tersebut, proses ini akan menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga pada akhirnya tumbuh rasa tanggung jawab terhadap program yang telah direncanakan, sehingga partisipasi dapat membantu pelaksanaan kegiatannya. Pada tingkat pelaksanaan, partisipasi bisa dalam bentuk menyumbangkan uang, tenaga, material atau bahkan juga keterampilan khusus, kemudian juga partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengevaluasi hasil kegiatan pembangunan, partisipasi juga menyangkut kegiatan keterlibatan dalam memelihara atau mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan apakah bermanfaat/memenuhi kebutuhan atau tidak.

Dengan demikian maka penulis mengambil Judul :

“Peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan di Distrik Biak Barat (Suatu Studi di Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang pembangunan ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan Kepala Distrik dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat di Bidang Pembangunan?

C. Tujuan

1. Tujuan

Sesuai dengan permasalahannya maka menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ingin mengetahui Peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan.
- 2) Mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang menentukan peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan.

• METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua dengan menitik beratkan pada peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan.

Lamanya penelitian : 6 bulan.

B. Metode dan Fokus Penelitian

1) Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada metode penelitian deskriptif. Dimana metode ini akan mendiskripsikan hasil penelitian.

Semiawan (dalam Moleong, 1996) megemukakan bahwa dilthy dan spranger mengintrodiksi istilah verstehen bermaksud menangkap makna. Dari sudut pandang pelaku yang menghayati kejadian tersebut melalui pengamatan si peneliti yang bersifat partisipatif. Penelitian deskriptif mencoba memahami menerobos gejalahnya dengan mengenterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana yang disajikan dalam situasinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini lebih di orientasikan dalam pendekatan partisipatif, maksudnya penelitian membahu dengan kehidupan masyarakat. masalah penelitian yang diuraikan tidaklah bersifat mati (statis) tetapi bersifat fleksibel (dinamis) yang dapat berubah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dimana metode deskriptif dalam pemahamannya data diwujudkan dalam rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk angka-angka. walaupun diuraikan angka-angka dalam tabel itu bukanlah menggunakan model analisis statistic tetapi data itu hanya sebagai pelengkap dalam menjelaskan dan memahami penelitian deskriptif.

2) Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian deskriptif tidak di mulai dari sesuatu masalah. Demikian pula didalam alam ini tidak ada masalah, hanya manusia itu sendiri yang mempersepsikan adanya masalah. Masalah dalam penelitian deskriptif dinamakan fokus. Pada dasarnya penentuan fokus menurut Lincoln dan guba (1985) bergantung pada paradigma yang akan di anut oleh seorang peneliti. Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya menetapkan fokus. pertama : penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua : penetapan fokus itu berfungsi untuk memiliki kriteria inklusif-esklusif atau memasukan suatu informasi yang mengalir masuk yang di peroleh di lapangan tahu persis data mana-mana di angap menarik,atau tidak relefan. Suatu hal perlu di ketahui bahwa penetapan fokus mungkin saja berubah, tetapi perubahan seperti itu menurut moleong (1996) merupakan suatu hal yang lazim bahkan sangat diharapkan dalam penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini maka fokus yang di arahkan dengan menekankan pada :

- a. Bagaimana Peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan.
- b. Faktor-faktor yang menentukan Peranan Kepala Distrik dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat di Bidang Pembangunan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dengan menekankan pada berbagai daftar pertanyaan yang dipandu oleh peneliti secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Terstruktur artinya peneliti berpatokan pada pertanyaan yang diarahkan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang terarah dan fokus pada substansi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan tidak terstruktur artinya mencoba memahami latar belakang terdalam yang akan dikaji dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Observasi diadakan secara partisipatif, dimana peneliti langsung membaaur dengan para masyarakat yang bermukim dilokasi penelitian yakni pada 8 kampung sesuai dengan yang ditetapkan. Cara penelitian diarahkan sesuai dengan penetapan fokus. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Distrik dan Kampung khususnya di Distrik Biak Barat.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis deskriptif. Tahapan analisis data dalam penelitian deskriptif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Oleh karena itu data deskriptif yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan penjelasan deskriptif. Dalam analisis juga menginterpretasikannya. Sebagaimana layaknya dalam penelitian sosial maka data dapat diverifikasi, diinterpretasi, dan dideskripsikan.

• HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peranan Kepala Distrik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala Distrik dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan di wilayah Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor berjalan sesuai dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus pemerintah provinsi Papua sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan sekarang.

Kepala distrik melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Bupati untuk berperan mendorong masyarakat kampung untuk berpartisipasi dalam kegiatan dibidang pembangunan. Hal ini nampak dengan jelas peranan kepala distrik dalam hubungan pemerataan bantuan dana langsung ke kampung yang bersumber dari dana otonomi khusus, dalam bentuk Blok Grant sebesar rata-rata Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kampung.

Pemberian kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Pemerintah provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta rakyat Papua, untuk memberdayakan semua lapisan masyarakat yang berada di kampung-kampung. Untuk itu pilar-pilar reformasi pelaksanaan pemerintah dan fiskal daerah yakni, demokrasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat menjadi dasar sekaligus tujuan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kampung (PPK).

Bantuan dana langsung tersebut pada saat penelitian ini sekaligus dapat melihat bagaimana peran kepala distrik dalam mendorong partisipasi masyarakat yang di lakukan sebagai berikut:

Kepala Distrik melakukan program yang bertujuan :

1. Tujuan Umum

Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan menuju kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat serta kemampuan kelembagaan milik masyarakat untuk mewujudkan program pokok dari konsep pembangunan yang berpusatkan pada manusia yaitu : makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, rakyat, dan infrastruktur dasar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mewujudkan keberadaan manusia baik individu, keluarga maupun masyarakat adat serta kaum perempuan Papua yang berada/menetap di wilayah Distrik dan Kampung/ Kelurahan, terutama kapasitas pengetahuan, sikap mental dan keterampilan.
- b. Mewujudkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum serta budaya masyarakat Papua di wilayah Distrik dan Kampung/Kelurahan yang berkelembagaan maju ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik dan mandiri.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, serta kaum perempuan Papua, meliputi penyediaan makanan dan gizi, kesehatan, ekonomi lokal maupun sarana/ prasarana dasar.
- d. Meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.
- e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan milik rakyat di kampung untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan.
- f. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kampung melalui kegiatan makanan dan gizi, ekonomi lokal, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

B. Faktor-faktor yang menentukan Peranan Kepala distrik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan.

Peranan Kepala Distrik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pembangunan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, hal ini dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1. Faktor Tingkat Pendidikan**
- 2. Faktor Fasilitas dan Transportasi**
- 3. Faktor Budaya Masyarakat**

- **PENUTUP**

- A. Kesimpulan**

1. Peranan Kepala Distrik Biak Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Bidang Pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan kampung yang memperoleh dana bantuan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Peranan Kepala Distrik dalam partisipasi masyarakat di lakukan dengan Prinsip-Prinsip Program Pembangunan Kampung (PKK) antara lain meliputi :

- 1) Pemberdayaan
 - 2) Keberpihakan kepada Orang Asli Papua
 - 3) Perlindungan terhadap Hak-hak Dasar
 - 4) Keterbukaan.
 - 5) Partisipasi
2. Faktor-faktor yang menentukan peranan Kepala Distrik dalam partisipasi masyarakat di Bidang Pembangunan antara lain :
 - 2.1 Faktor Pendidikan
 - 2.2 Faktor Fasilitas dan Transportasi
 - 2.3 Faktor Sosial Budaya Masyarakat

- B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan disuatu wilayah Distrik memerlukan peranan kepemimpinan Kepala Distrik. Untuk itu, disarankan bahwa kepada Distrik harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

2. Tingkat pendidikan pada masyarakat usia sekolah perlu mendapat perhatian, supaya jumlah masyarakat yang butah huruf di masa datang akan berkurang. Dan nilai-nilai budaya masyarakat asli perlu mendapat pembinaan secara terus-menerus agar tidak punah, dengan adanya pengaruh nilai-nilai yang bersifat individualis yang sedang menjalar di masyarakat.

• **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo.2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Abdul, A.D., 1985. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berencana*. Desertasi. Univesitas Pajajaran Bandung.
- Batten. T.R., 1978. *Communities and Their Development*, Oxford Univ. Press.
- Bhattacharryya, 1972. *Administrative Organization for Development HAS*, Brussels.
- Bintoro. Tjkroamidjoyo, 1980. *Administrasi Pembangunan*, PT Gramedia Jakarta.
- Bryant C. dan L.G. Whyte, 1982. *Managing Development in The World Westview*, Boulder, Colarado.
- Cohen, J. M. and N. T. Uphoff, 1979. *Rural Development Participation*, Cornel University. New York.
- D.D. Fagg, 1958. *Authority and Social Structure: a Study in Javanese Bureaucracy Camberige, Masschustts*, Harvard Unifersity (Microfilm).
- Friedman J. 1981. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. PT Tiara Wacana yogya, Yogyakarta.
- Herbert spencer 1989. *Pengantar Sosiologi* ,PT Gramedia. Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta .
-, 1987. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Penerbit Jembatan, Jakarta.

- Mahmudi, Muhammad; Nuddin H; Diana, A. 2007. *Daya Dukung Ekologi dan Ekonomi Ekosistem Mangrove Terhadap Produksi Perikanan Sebagai Dasar Pengelolaan Teknologi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Misra, 1981. *Rural Development National Policies and Experiences*, Maruzen Asia Nagoyo.
- M. Yacub AL-Barry Dahlan 2001, *Kamus Sosiologi*. Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1998. *Enveronmental Economics and Sustainable Development*. Word Bank Enbironnment Paper Number 2.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Partisipasi Masyarakat Desa di Beberapa Desa*. Yayasan Karya Dharma, Jakarta.
- 1987. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1998. *Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nico Sehlte Nordholt 1987. *Ojo Dumech-Kepemimpinan Local Dalam Pembangunan*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Pasaribu, T.L dan B Simanjuntak, 2006. *Sosiologi Pembangunan*. Tarsito, Bandung.
- Raharja Dawan, 1983. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembagunan* , Pradnya Paramita.
- Raharusun, Yohanis A, 2009. *Daerah Khusus Dalam Perspektif NKRI (Telaah Yuridis Terhadap Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Slamet , Y. 1993. *Pembagunan Dasar-Dasar dan Pengertiannya*. CV Usaha Nasional. Surabaya.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Silalahi, T.B. 1999, *Manajemen Partisipasi*, CV Rajawali. Jakarta.
- Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M. Fahrurrosi, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke Masa*, Penerbit Fokus Media. Jakarta.

Slamet Y, 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Todaro , M.P. 1991. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Tjokroaminoto, B. 1984. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. PT Gunung Agung, Jakarta.

Unifa Rosidi 2007, *Reformasi Administrasi Sub Nasional Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor*, Ringkasan Disertai Universitas Indonesia.

Walmaliki, W. 1999. *Beberapa Factor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Partisipasi Pascasarjana-Univesitas Sam Ratulangi, Manado*. Tidak di Terbitkan.

W.J.S. Poerwadarminta 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Penerbit Balai Pustaka Nasional.

Sumber-sumber lain :

- Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
- PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.